

PAMERAN

26



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2002

ANALISIS PERBANDINGAN EKONOMI ISLAM DENGAN EKONOMI KONVENSIONAL DARI PERPEKTIF MIKRO DAN MAKRO

Peneliti:

Dra.Ec. MURYANI, Msi.
Drs.Ec. PANDE MADE S.
Dra. NISFUL LAILA

28/02
15
[Signature]

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2002

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4879/J03/PG/2001

Tanggal 7 Juni 2002

Nomor Urut: 30

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2002



ECONOMICS - RELIGIOUS ASPECTS - ISLAM



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2002

KKB
KK-2B
297.273
Mur
a

ANALISIS PERBANDINGAN EKONOMI ISLAM DENGAN EKONOMI KONVENSIONAL DARI PERPEKTIF MIKRO DAN MAKRO

Peneliti:

Dra.Ec. MURYANI, Msi.
Drs.Ec. PANDE MADE S.
Dra. NISFUL LAILA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

30002370331A1

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2002
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4879/J03/PG/2001
Tanggal 7 Juni 2002
Nomor Urut: 30

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olah Raga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian	: Analisis Perbandingan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional Dari Ferfektif Mikro dan Makro
a. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
b. Kategori Penelitian	: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
2. Kepala Poyek Penelitian	
a. Nama lengkap dan Gelar	: Dra.Ec. Muryani
b. Jenis kelamin	: Perempuan
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) 132 048 734
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Ekonomi
f. Univ/Ins./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Ekonomi
3. Jumlah Tim Peneliti	: 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian	: Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 4.000.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian	
a. Dilaksanakan Tanggal	14 Nopember 2002
b. Hasil Penelitian	() Baik Sekali (V) Baik () Sedang () Kurang

Surabaya, 14 Nopember 2002



Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125

RINGKASAN

ANALISIS PERBANDINGAN EKONOMI ISLAM DENGAN EKONOMI KONVENSIONAL DARI PERSPEKTIF MIKRO DAN MAKRO (Muryani, Pande Made Sri Asih, Nisful Laila, 2002, 50 Halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan prinsip antara teori ekonomi konvensional dengan ekonomi islam dari aspek makro maupun mikro.

Beberapa batasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

Sistem Ekonomi Islam merupakan Madzhab ekonomi islam, yang terjelma di dalamnya bagaimana cara islam mengatur kehidupan perekonomian, dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh madzhab ini tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral islam dan nilai-nilai ekonomi, atau nilai-nilai sejarah yang ada hubungannya dengan uraian sejarah masyarakat (M.Baqir As.Shadr, 1968)

Sistem Ekonomi Kapitalis (Liberalis) : Suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada azas *Lisses Faire, Laisses Aller*, kesejahteraan umum akan tercapai dengan sendirinya jika setiap orang, setiap individu dibiarkan bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah; karena didorong oleh kepentingannya pribadi, maka produksi akan disempurnakan dan terus meningkat dengan sendirinya (Adam Smith, 1775. terjemahan).

Sistem Ekonomi Marxis : Suatu sistem yang didasarkan pada faham marxisme yang memberi tekanan pada Teori Nilai. Nilai suatu barang terletak dalam tenaga yang

dipergunakan untuk membuat benda tersebut, maka semua nilai itu diberikan kepada manusia yang membuatnya yaitu kaum buruh. (David Ricardo, Karl Marx, saluran).

Aspek Mikro Ekonomi : Yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari alokasi dari sumber daya yang terbatas, khususnya berkenaan dengan aliran barang dan jasa dari sektor rumah tangga konsumen dan aliran faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen serta gabungan dari dua aliran tersebut serta pengenaan harga dari komponen aliran produk. Jadi cakupan dari mikro pada umumnya hanya berkenaan dengan sektor rumah tangga dan produsen serta pengaruh campur tangan pemerintah terhadap keseimbangan yang diperoleh oleh produsen dan konsumen

Aspek Makro Ekonomi : Yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang membahas perilaku perekonomian secara menyeluruh. Hal ini memberi pengertian bahwa yang dibahas pada aspek makro adalah besaran-besaran misalnya Pendapatan Nasional, konsumsi, Investasi, kebijakan fiskal moneter, pengangguran, inflasi dan sistem perbankan.

Sumber Data : Data atau referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari :

1. Studi kepustakaan / literatur yang dianggap relevan
2. Jurnal penelitian dari berbagai penerbitan
3. Karya ilmiah / artikel dari berbagai penerbitan

Teknik Analisis : Pada penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif melalui studi kepustakaan. Berbagai teori yang ada dari berbagai aliran / sistem dilakukan suatu dialog sehingga dapat ditemukan suatu perbedaan-perbedaan yang prinsip dan rinci

dua sistem ekonomi yang berbeda (Sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam). Analisa perbedaan dua sistem ini difokuskan tidak hanya pada aspek makro tapi juga pada aspek mikro. Dialog dua teori yang berbeda ditujukan sebagai pengayaan pemikiran tentang sistem ekonomi religius dan human.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR / ILUSTRASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Islam	6
2.2. Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Konvensional	14
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
3.1. Tujuan Penelitian	15
3.2. Manfaat Penelitian	15
IV. METODE PENELITIAN	16
4.1. Definisi Operasional	16
4.2. Sumber Data	17
4.3. Teknik Analisis	18
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	19
5.1. Teori Uang Menurut Ekonomi Konvensional dan Islam	19
5.2. Teori Inflasi Konvensional dan Islam	20
5.3. Kebijakan Fiskal dan Moneter Konvensional dan Islam	23
5.4. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan	29
5.5. Instrumen Moneter	31
5.6. Aplikasi Instrumen Moneter Konvensional di Indonesia	39

5.7. Nilai Tukar Uang	39
5.8. Teori Konsumsi	43
5.9. Teori Produksi	44
5.10. Teori Permintaan	47
5.11. Teori Penawaran	49
5.12. Negative Externality	50
5.13. Mekanisme Pasar	51
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1.	PENGARUH ZAKAT TERHADAP KURVA PENAWARAN.....	27
Gambar 5.2.	DAMPAK KEBIJAKSANAAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN	30
Gambar 5.3.	MINIMALISASI BIAYA UNTUK MEMPRODUKSI JUMLAH YANG SAMA	45
Gambar 5.4.	MAKSIMALISAI PRODUK UNTUK BIAYA YANG SAMA	46
Gambar 5.5.	SKALA EKONOMI ANTARA SISTEM INTERES DENGAN ROFIT/REVENUE SHARING	47

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penelitian ini yang berjudul "Analisis Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional dari Perspektif Mikro dan Makro.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang memberi bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil hingga terselesaikannya penulisan laporan ini.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengayaan pada teori ekonomi yang sebelum ini kita pelajari yang cenderung pada teori-teori ekonomi konvensional.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang masih parsial dan belum menyeluruh.

Mengingat bahwa literatur ekonomi Islam kurang begitu tersedia, maka teori ekonomi Islam yang dipaparkan disini menjadi tidak seimbang dengan kelengkapan literatur maupun teori-teori ekonomi konvensional.

Pada penelitian selanjutnya, siapapun yang mengadakan penelitian sejenis ini, pemula berharap, lebih mampu menyempurnakan teori-teori ekonomi Islam yang lebih lengkap.

Akhir kata semoga penelitian ini berguna bagi semua pihak, dan peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

BAB I PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak tokoh-tokoh ekonomi mulai mempelajari dan memperkenalkan / membahas sistem ekonomi yang dianggap sebagai alternatif sistem ekonomi yang ada (konvensional) yaitu sistem ekonomi Islam.

Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah ketika aktivitas produksi dan konsumsi muncul dalam kehidupan manusia. Manusia dihadapkan pada persoalan bagaimana memelihara, mempertahankan dan menyambung kehidupannya. Mula-mula cukup sekedar mengambil hasil dari alam untuk memenuhi kebutuhannya. Karena jumlah manusia bertambah banyak maka perlu kerja keras & bersaing untuk bisa terus hidup dan meningkatkan taraf ekonominya.

Karena persoalan produksi, konsumsi dan perdagangan adalah fenomena kehidupan manusia yang universal sifatnya, maka embrio lahirnya etika ekonomi sesungguhnya telah hidup dimana-mana sesuai dengan penyebaran tempat hidup manusia. Embrio pengetahuan ekonomi memperoleh tempat yang subur untuk berkembang oleh serangkaian proses pemikiran para ekonom.

Pada awalnya ekonomi dan agama tidak terpisah. Akhir tahun 1700-an, ahli ekonomi Eropa adalah pendeta dan ahli agama. Pada jaman pertengahan Eropa, Ekonom Skolastik dikembangkan oleh ahli gereja seperti Thomas Aquinas, Augustine dll. Tetapi sejak revolusi industri dan adanya produksi massal, ahli ekonomi mulai memisahkan ekonomi dan agama. Hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya buku *the wealth of Nation* dari Adam Smith. Smith tidak percaya



pada dorongan subyektif yang ikhlas yaitu kesadaran moral yang medasari tindakan ekonomi seseorang. Teori inilah yang sampai kini mendasari perkembangan ilmu ekonomi liberal yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Disamping faham kapitalis, tumbuh pula faham komunisme yang ternyata dalam perjalanan sejarahnya banyak menimbulkan ketimpangan ekonomi. Banyaknya kelompok yang mengalami kemiskinan di tengah sekelompok individu yang makmur, menunjukkan kegagalan teori ini.

Para ekonomi kontemporer mulai mencari-cari lagi sampai mereka menyadari kembali betapa pentingnya kajian kerangka aksi ekonomi yang berkarakter religius dan bermoral. Kesadaran ini tumbuh setelah semua bangsa menyaksikan sendiri hasil dari model pembangunan sosio-ekonomi yang berasaskan model liberal – kapitalis maupun model Marxist yang keduanya ini mengutamakan kehidupan materialistik hedoisme.

Kajian ilmu ekonomi pada abad pemikiran dewasa ini nampaknya akan mengarah kepada tidak hanya bertolak dari asas kapitalisme dan marxisme, tetapi ada asas alternatif yang lebih azali. Selama ini sistem ekonomi yang dianggap gagal tersebut terutama dilihat dari alokasi dan distribusi aset-aset ekonomi yang menumpuk pada sekelompok pemilik modal. Disini terjadi ketimpangan atau tiadanya pemerataan akses dalam iklim yang penuh persaingan sehingga menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Pada saat ini manusia sedang menapaki salah satu masa sejarah yang paling kritis tetapi kreatif. Ditengah krisis sistem kontemporer yang bebas nilai dimunculkan sistem ekonomi Islam yang memuat nilai religius kehidupan. Membangun sebuah sistem moral ekonomi

tidak hanya memerlukan perangkat kelembagaan yang secara formal berlaku, tetapi juga perangkat ilmu yang secara teoritis dapat diterapkan.

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif terutama karena ajaran Islam yang mengutamakan *egalitarianisme*, sehingga ketimpangan ekonomi dapat diredam. Namun disadari bahwa belum ditemukan adanya model empirik dari sistem ekonomi Islam dalam peradaban kontemporer ini. Karena itu pembahasan tentang sistem ekonomi Islam selalu lebih mengesankan bersifat normatif – deduktif. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha memfokuskan pada kajian empiris dengan membandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem konvensional baik perspektif mikro maupun makro.

Rumusan Masalah :

Pada penelitian ini permasalahan yang dikemukakan adalah :

Apakah terdapat perbedaan yang prinsip jika ditinjau menurut teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional ?.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa teori yang akan melandasi penelitian ini adalah :

1. Teori-teori ekonomi konvensional yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi marxis.
2. Sistem ekonomi islam .

Dua sistem ekonomi inilah yang akan dikaji secara rinci. Namun untuk memberi arah pembahasan agar tidak terlalu menyebar maka peneliti lebih menekankan pada beberapa item bahasan yang berkaitan dengan sistem. Berikutnya akan dibahas lebih detil ketiga sistem tersebut.

Suatu sistem pada dasarnya sama, yang membedakan adalah substansi nilai tersebut yang ditentukan oleh aliran pemikiran tertentu. Bertolak pada batasan diatas, maka sistem ekonomi tertentu haruslah tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu.

Perangkat nilai-nilai ini disatu pihak akan berdasarkan pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, dipihak lain interaksi nilai-nilai ini membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem. Oleh karena itu tiga komponen penting yang menyusun eksistensi suatu ekonomi yaitu :

1. Filsafat Sistem
2. Nilai Dasar Sistem
3. Nilai Instrumental Sistem

Bertolak dari filsafat sistem ekonomi dapat diturunkan nilai-nilai dasar sistem yang akan membangun kerangka sosial, legal dan tingkah laku dari sistem, kemudian diturunkan nilai-nilai instrumental sistem sebagai peran at peraturan yang menggerakkan sistem itu bekerja.

Bahasan berikutnya difokuskan pada perbedaan dari aspek mikro dan makro ekonomi:

Sistem Ekonomi Konvensional :

1. Aspek Mikro Ekonomi

Beberapa teori yang mendukung adalah : Modern Microeconomics Theory, Koutsoyiannis; Microeconomic, G.S. Maddala; Microeconomic Theory, Walker Nicolson dan beberapa teori ekonomi mikro dari pakar ekonomi lainnya.

2. Aspek Makro Ekonomi

Beberapa teori yang mendukung adalah : Macro economic, Jr. Charles Delorme; Economics, Paul.A Samnelson; Macro economics, Walter Nicolson dan beberapa pakar ekonomi domestik.

Sistem Ekonomi Islam :

1. Aspek Mikro Ekonomi

Beberapa teori yang mendukung terdiri dari 3 Mazhab

Yaitu : 1. Mazhab Baqir as-Sadr

2. Mazhab Mainstream

3. Mazhab alternatif-kritis.

Ketiga aliran mazhab inilah yang akan dikaji lebih mendalam tentang teori ekonomi mikro islam.

2. Aspek Makro Ekonomi

Beberapa teori yang mendukung adalah: makro, 2001, Adiwarmanto A.K; Omer Chapra; Edi Swasono; Lubis; Al-Ghozali; Ibn. Taimiyah; Ibn. Khaldun.

Beberapa pakar inilah yang memiliki pandangan teori ekonomi makro islam yang akan dikaji lebih mendalam tentang perbedaannya dengan teori ekonomi makro konvensional.

2.1. Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Islam

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni : Tauhid (keimanan), Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.

Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership, freedom to act, and social justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan diatas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlaq. Akhlaq menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlaq manusia. Akhlaq inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

1. Nilai-Nilai Universal-Teori Ekonomi

Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam, rinciannya :

a. Tauhid (keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. KarenakepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. ‘Adl (keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatNya adalah adil. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada manusia yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

c. Nubuwwah (Kenabian)

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul; untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal-muasal segala, Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani oleh manusia. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut :

1. Siddiq (benar, Jujur)

Sifat *siddiq* harus menjadi *visi* hidup setiap muslim, karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus diajalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar. Dengan demikian tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik. Dengan konsep *siddiq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektifitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar).

2. Amanah (Tanggung jawab, Kepercayaan, Kredibilitas).

Amanah menjadi *visi* hidup setiap muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena

dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3. Fathanah (Kecerdikan, Kebijakan, Intelektualitas).

Sifat ini dapat dipandang sebagai *strategi* hidup setiap muslim. Karena untuk mencapai *Sang Benar*, kita harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah *akal (intelektualitas)*.

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa setiap aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.

4. Tabligh (komunikasi, Keterbukaan, Pemasaran).

Sifat ini merupakan *taktik* hidup muslim. Karena setiap muslim mengemban tanggung jawab da'wah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini nila sudah mendarah daging pada setiap muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massa), pemasaran, penjualan, periklanan,

pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan, dan lain-lain.

Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Nabi misalnya mengajarkan bahwa “Yang terbaik di antaramu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”. Dengan kata lain, bila kita ingin “menyenangkan Allah”, maka kita harus menyenangkan hati manusia. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia, dan terus-menerus mengejar hal yang terbaik sampai menuju kesempurnaan. Karena hal yang demikian dianggap sebagai cerminan dan penghambaan (ibadah) manusia terhadap penciptanya.

d. **Khilafah (Pemerintahan)**

dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khafilah* di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Fungsi utamanya adalah agar menjadi keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok-termasuk dalam bidang ekonomi - - agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Ini semua merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara / pemerintah dan masyarakat. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah), yang menurut Imam Al-

Ghazaliy adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia.

e. **Ma'ad (Hasil=Return)**

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai “kebangkitan” secara harfiah ma'ad berarti ‘kembali’. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam setengah dunia (akhirat).

Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazaly yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

2. **Prinsip-prinsip Derivatif – Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam**

Kelima nilai yang telah diuraikan di atas menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islami. Seperti dibicarakan di muka, dari kelima nilai ini kita dapat menurunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi islami. Prinsip derivatif tersebut uraiannya adalah sebagai berikut :

a. **Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenis)**

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan

swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku kepemilikan multijenris, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid : pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian konsep kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segoongan orang terhadap segolongan orang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta-negara, swasta-domestik-asing, atau negara-asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, norma dan nilai-nilai Islam.

b. Freedom to act (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Ketika menjelaskan nilai nubuwwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam sifat utama, yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Sedapat mungkin setiap muslim harus dapat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.



Keempat nilai-nilai nubuwah ini biladigabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan pengahayatan nilai keadilan.

c. Social Justice (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

3. Akhlaq – Perilaku Islami dalam Perekonomian

Sekarang kita telah memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi islami yang mantap. Namun dua hal ini belum cukup karen ateori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlaq secara professional (*ihsan, itqan*) dalam bidang ekonomi. Baik dia itu dalam posisi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah. Karena teori yang unggul dan sistem-sistem ekonomi yang sesuai syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat Islam akan otomatis maju. Sistem ekonomi islami hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yangbertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pada *man behind the gun*-nya. Karena itu pelaku pelaku



Keempat nilai-nilai nubuwwah ini biladigabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan pengahayatan nilai keadilan.

c. Social Justice (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

3. Akhlaq – Perilaku Islami dalam Perekonomian

Sekarang kita telah memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi islami yang mantap. Namun dua hal ini belum cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara professional (*ihsan, itqan*) dalam bidang ekonomi. Baik dia itu dalam posisi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah. Karena teori yang unggul dan sistem-sistem ekonomi yang sesuai syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat Islam akan otomatis maju. Sistem ekonomi islami hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pada *man behind the gun*-nya. Karena itu pelaku pelaku

ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegang oleh umat non muslim. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku muslimin dan uslimat sudah *itqan* (tekun) dan *ihsan* (profesional).

2.2. Prinsip-Prinsip Ilmu Ekonomi Konvensional

1. Bahwa pembuatan keputusan baik ditingkat individual maupun kolektif senantiasa menghadapi "trade-off" antara berbagai alternatif / pilihan tujuan.
2. Biaya adalah segala sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu.
3. Pembuatan keputusan senantiasa rasional dengan membandingkan manfaat marginal dengan biaya marginal.
4. Perilaku manusia cenderung berubah sesuai dengan insentif yang ditawarkan.
5. perdagangan dianggap dapat memberikan keuntungan timbal balik.
6. Pasar secara umum merupakan wahana yang baik guna mengkoordinasikan kegiatan ekonomi.
7. Pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil kerja mekanisme pasar.
8. Standar hidup di suatu negara tergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa.
9. Harga-harga akan meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak.
10. Masyarakat menghadapi trade - off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui di mana letak perbedaan-perbedaan yang prinsip antara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi islam baik dari perspektif makro maupun mikro.

3.2. Manfaat Penelitian :

- 1. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan khususnya tentang sistem ekonomi alternatif yaitu sistem ekonomi islam.**
- 2. Megetahui perbedaan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan marxis) baik dari aspek mikro ekonomi maupun dari aspek makro ekonomi.**

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Definisi Operasional

Beberapa batasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

Sistem Ekonomi Islam :

merupakan Madzhab ekonomi islam, yang terjelma di dalamnya bagaimana cara islam mengatur kehidupan perekonomian, dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh madzhab ini tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral islam dan nilai-nilai ekonomi, atau nilai-nilai sejarah yang ada hubungannya dengan uraian sejarah masyarakat (M. Baqir As. Shadr, 1968)

Sistem Ekonomi Kapitalis (Liberalis) :

Suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada azas *Lisses faire, Laisses aller*, kesejahteraan umum akan tercapai dengan sendirinya jika setiap orang, setiap individu dibiarkan secara bebas berusaha tanpa adanya campur tangan pemerintah; karena didorong oleh kepentingannya pribadi, maka produksi akan disempurnakan dan terus meningkat dengan sendirinya (Adam Smith, 1775, terjemahan)

Sistem Ekonomi Marxis :

Suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada faham marxisme yang memberi tekanan pada Teori Nilai. Nilai suatu barang terletak dalam jumlah tenaga yang diperlukan untuk membuat benda itu. Karena nilai barang itu terletak dalam tenaga yang dipergunakan untuk membuat benda tersebut, maka semua

nilai itu diberikan kepada manusia yang membuatnya yaitu kaum buruh.
(David Ricardo, Karl Marx, saluran)

Aspek Mikro Ekonomi :

Yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari alokasi dari sumber daya yang terbatas, khususnya berkenaan dengan aliran barang dan jasa dari sektor rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumen dan aliran faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen serta gabungan dari dua aliran tersebut serta pengenaan harga dari komponen aliran produk. Jadi cakupan dari mikro pada umumnya hanya berkenaan dengan sektor rumah tangga dan produsen serta pengaruh campur tangan pemerintah terhadap keseimbangan yang diperoleh oleh produsen dan konsumen.

Aspek Makro Ekonomi :

Yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang membahas perilaku perekonomian secara menyeluruh. Hal ini memberi pengertian bahwa yang dibahas pada aspek makro adalah besaran-besaran ... misalnya Pendapatan Nasional, konsumsi, Investasi, kebijakan fiskal moneter, pengangguran, inflasi dan sistem perbankan.

4.2. Sumber Data :

Data atau referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari :

1. Studi kepustakaan / literatur yang dianggap relevan
2. Jurnal penelitian dari berbagai penerbitan
3. Karya ilmiah / artikel dari berbagai penerbitan

4.3. Teknik Analisis :

Pada penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif melalui studi kepustakaan. Berbagai teori yang ada dari berbagai aliran / sistem dilakukan suatu dialog sehingga dapat ditemukan suatu perbedaan-perbedaan yang prinsip dan rinci mengenai dua sistem ekonomi yang berbeda (Sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam). Analisa perbedaan dua sistem ini difokuskan tidak hanya pada aspek makro tapi juga pada aspek mikro. Dialog dua teori yang berbeda ditujukan sebagai pengayaan pemikiran tentang sistem ekonomi religius dan human.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Perbedaan Ekonomi Islam Dan Konvensional Dalam Prespektif Makro

5.1. Teori Uang Menurut Ekonomi Konvensional Dan Islam

Menurut Keynes, yang menjabarkan teori Marshall-Pigou bahwa seseorang melakukan permintaan terhadap uang (*money demand*) dilatar belakangi tiga hal :

1. Permintaan uang untuk transaksi (*money demand for transaction*)
2. Permintaan uang untuk berjaga-jaga (*money demand for precautionary*)
3. Permintaan uang untuk spekulasi (*money demand for speculation*)

Menurut Marchall Pigou, uang bukan *Flow Concept* tapi *Stock Concept* sehingga berfungsi sebagai salah satu cara menyimpan kekayaan (*store of wealth*). Jadi dalam hal ini seseorang memiliki pilihan (*individual choice*) untuk memelihara asetnya apakah dalam bentuk obligasi (*bonds*), stock (*saham*), uang (*money*) dan lain-lain.

Sedangkan menurut konsep islam, uang bukanlah *Stock Concept* tapi *Flow Concept*, semakin cepat peredaranya atau perputarannya semakin baiklah kondisi perekonomian. Jika mengendap, hal ini disebut *Stock Concept*, oleh karena itu uang adalah *public goods* bukan *private goods* (*capital*). Ciri *public goods* adalah dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengganggu orang lain. Semakin tinggi tingkat produksi semakin besar kesempatan memperoleh return (penghasilan) dari *public goods* (*money*) tersebut.

Aktifitas menabung (*saving*) harus diarahkan pada kegiatan produktif (*sektor riil*). Jika tidak, maka tabungan bukan saja tidak mendapatkan penghasilan (*return*) tapi uang tersebut harus dikenakan zakat.

Oleh karena itu dalam Islam fungsi uang hanya dikenal dua macam yaitu:

1. Alat pertukaran (*medium of exchange for transaction*)
2. Satuan nilai (*unit of account*)

Jadi dalam Islam tidak mengenal fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) atau alat penyimpan kekayaan (*store of wealth*). demikian juga motif permintaan uang dalam Islam tidak dikenal untuk tujuan spekulasi. jadi uang bermotif:

1. Permintaan uang untuk transaksi
2. Permintaan uang untuk berjaga-jaga

Penggunaan uang untuk tujuan spekulasi sama halnya dengan memenjarakan uang. Hal ini diungkapkan oleh Imam Ghazali, “memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang”.

5.2. Teori Inflasi Konvensional Dan Islam

Salah satu penyakit perekonomian adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para pemikir ekonomi di dunia.

Pada dasarnya inflasi adalah gejala ekonomi yang berupa naiknya tingkat harga dari berbagai macam barang secara terus menerus. menurut ekonom Amerika (Harvard University) N. Gregory Mankiw, bahwa penyebab utama inflasi adalah

~

pertumbuhan kuantitas uang yang cepat. Jika dijabarkan lebih rinci penyebab inflasi dapat digolong-golongkan sebagai berikut:

1. *Demand-pull Inflation* (Inflasi tarikan permintaan). Inflasi ini sebagai akibat dari meningkatnya permintaan agregatif. dengan mendasarkan kepada asumsi kesempatan kerja penuh (Full Employment), maka meningkatnya permintaan agregatif akan mengakibatkan naiknya tingkat harga. Dengan kata lain terjadilah inflasi.
2. *Cost – pull Inflation* (Inflasi dorongan harga). Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan yang menggunakan kekuatan monopolinya dengan cara menaikkan harga jual hasil-hasil produksinya atau bisa juga disebabkan oleh karena banyak serikat buruh yang menggunakan kekuatan monopsonistiknya untuk menuntut untuk dinaikkannya gaji nominal mereka.
3. Inflasi campuran, yaitu inflasi yang mempunyai unsur baik demand-pull maupun Cost-push. inflasi jenis ini disebut sebagai Mixed Inflation. Dimana tarikan permintaan dan dorongan biaya terjadi saling dorong mendorong sehingga bisa terjadi inflasi yang hebat.

Sedang menurut ekonomi islam, Taqjudin Ahmad (13 GAM 1441 M) yang merupakan salah satu murid Ibn Khaldan, membedakan inflasi berdasarkan sebab terjadinya ada dua :

1. *Natural Inflation* (inflasi alamiah)
2. *Human error inflation* (fals inflation)

Penyebab terjadinya natural inflation (inflasi alamiah) adalah :

Sebab pertama : Akibat uang yang masuk dan keluar terlalu banyak, dengan ekspor meningkat ($X \uparrow$) sedangkan impor menurun ($M \downarrow$). Sehingga nilai net export yang

sangat besar mengakibatkan naiknya permintaan agregat. Sebab yang pertama ini ada kemiripan dengan teori inflasi konvensional. Bedanya teori inflasi Islam membesarkan pada sebab-sebab dari luar negeri yang mempengaruhi kondisi dalam negeri.

Sebab kedua :

Akibat turunnya tingkat produksi (penawaran agregat turun) yang bisa saja disebabkan misalnya kegagalan panen, terjadinya perang berkepanjangan, ataupun embargo dan boikot oleh negara lain. Sebab yang kedua lebih menitikberatkan pada sebab kelangkaan barang, yang berbeda dengan teori konvensional yang lebih menekankan masalah sebab kenaikan biaya (cost of production).

Human Error inflation adalah inflasi yang disebabkan kesalahan manusia, yang jika digolongkan terdapat tiga sebab :

1. Korupsi dan administrasi yang buruk (corruption and bad administration).
Korupsi yang parah akan mengganggu tingkat harga karena produsen akan menaikkan harga jual produknya untuk menutupi biaya "siluman" yang telah dikeluarkan. Biaya siluman tersebut mereka masukkan dalam (cost of goods) biaya produk yang dijual. Harga terdistorsi oleh komponen yang seharusnya tidak ada sehingga terjadi ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dan pada akhirnya terjadi inefisiensi alokasi sumber daya yang merugikan masyarakat. Demikian juga administrasi yang buruk erat kaitannya dengan korupsi dan inefisiensi yang berpengaruh pada meningkatnya harga-harga.
2. Pajak yang berlebihan (excessive tax). Efek yang ditimbulkan oleh pajak yang berlebihan pada perekonomian hampir sama dengan efek yang disebabkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk. Efek pajak yang berlebihan adalah

terjadinya penurunan penawaran agregatif dan lebih jauhnya menyebabkan efficiency loss atau dead weight loss, artinya bidang atau sektor lain yang mendapat pajak tinggi menjadi tidak diminati oleh masyarakat dan akan beralih pada sektor lain yang pajaknya relatif rendah. Akibatnya terjadi kelangkaan penawaran barang yang terpacu dengan tinggi. Karena supply barang tersebut langka maka terjadilah kenaikan harga-harga.

3. Pencetakan uang untuk menarik keuntungan (*excessive selg norage*). Menurut Al Magrizi pencetakan uang yang berlebihan jelas akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan (*inflasi*).

Perbedaan dengan teori inflasi islam konvensional lebih pada sebab yang kedua ini yaitu sebab kesalahan kebijakan atau kesalahan perilaku manusia. sebab ini yang tampaknya diabaikan oleh teori inflasi konvensional ternyata berdampak yang tidak kecil pada perekonomian.

5.3. Kebijakan Fiskal dan Moneter Konvensional dan Islam

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan fiskal dibuat karena gagalnya mekanisme pasar (*market failure*). Apabila kegagalan ini terus terjadi, akan terjadi distorsi atau gangguan terhadap penawaran dan permintaan, yang dapat mengganggu keseimbangan permintaan agregatif dan penawaran agregatif pada aktivitas perekonomian.

Instumen variabel untuk kebijakan fiskal yang sering digunakan adalah :

1. Pajak (Tax)
2. Transfer Pemerintah (T)

3. Pengeluaran Pemerintah (G)

Sedangkan instrumen kebijakan fiskal pada zaman pemerintahan islam adalah :

1. Pendapatan Nasional
2. Pajak (khusus)
3. Anggaran
4. Kebijakan Fiskal Khusus

Perbedaan instrumen kebijakan fiskal ini menyebabkan perbedaann ruktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah gambaran kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dan pengeluaran untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Struktur APBN dalam hal ini misalnya APBN Indonesia

STRUKTUR SEDERHANA APBN

Penerimaan	Pengeluaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan dalam negeri <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak b. Buku Pajak 2. Penerimaan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah b. Pinjaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Negeri <ol style="list-style-type: none"> a. Belaja Rutin b. Pembiayaan Pembangunan 2. Dana Perimbangan 3. Pembiayaan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Negeri b. Luar Negeri

Sedangkan Struktur APBN Pemerintahan Islam Zaman Rasulullah

STRUKTUR SEDERHANA ISLAM

Penerimaan	Pengeluaran
1. Kharaj	1. Penyebaran Islam
2. Zakat	2. Pendidikan dan Kebudayaan
3. Khums	3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
4. Jizya	4. Pembangunan Infrastruktur
5. Kaffarah	5. Pembangunan Armada Perang dan Keamanan
6. Penerimaan Lain	6. Penyediaan Lapangan Kesejahteraan sosial

Sedangkan dalam kebijaksanaan fiskal islam dan pengaruhnya terhadap ekonomi dijelaskan sebagai berikut :

1. Kharaj

Sumber pendapatan inilah yang pertama kali diperkenalkan pada zaman Rasulullah SAW. Kharaj adalah pajak atas tanah, setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) di Indonesia. Perbedaan mendasar antara sistem PBB dan sistem Kharaj adalah Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah (land productivity), bukan berdasarkan zoning, artinya mungkin saja terjadi, untuk tanah yang bersebelahan, di satu sisi ditanam anggur dan disisi lain ditanam kurma, dihasilkan jumlah kharaj yang berbeda.

Yang menentukan jumlah kharaj adalah pemerintah. Secara spesifik, besarnya kharaj di tentukan oleh tiga hal berikut :

- a. Karakteristik tanah atau tingkat kesuburan tanah
- b. Jenis tanaman, termasuk daya-jual (marketability) dan jumlah (quantity)

c. Jenis irigasi

Kharaj dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik kalangan muslim maupun nonmuslim.

2. Zakat

Pada awal-awal masa pemerintahan islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil perternakan, hasil pertanian.berikut ini dipaparkan sistem pajak untuk setiap usaha :

Zakat Pendapatan, zakat ini dihitung berdasarkan nisab (pendapatan minimum), nisab zakat untuk dinar dan dirham masing-masing 20 dinar dan 200 dirham, sedangkan jumlah zakat yang dikeluarkan besar 2,5% dari jumlah nisab, Bila jumlah pendapatan kurang dari nisab, dibebaskan dari zakat.

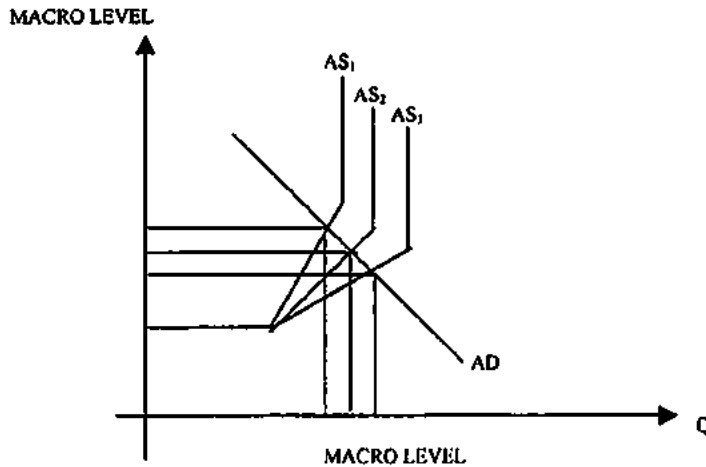
Zakat Perternakan, karakteristik zakat perternakan (livestock) adalah penerapannya secara regresif (regressive rate). Semakin banyak jumlah hewan peliharaan, semakin kecil rate-nya dan perbedaan ukurannya.

Zakat Pertanian, berbeda dengan zakat perternakan, zakat pertanian menggunakan sistem flat rate yang membeda-bedakan jenis pengairan yang dipergunakan. dasar pertimbangannya, bila hasil pertanian merupakan barang yang tidak tahan lama (non-durable), dikhawatirkan akan busuk bila hasil panen melimpah.

Pengaruh zakat adalah terhadap maximizing behaviour dan economies of scale Sehingga turunnya average total cost dan marginal cost secara jangka panjang disebabkan oleh economies of scale. Hal ini mengakibatkan berubahnya slope penawaran agregatif (AS) dalam jangka panjang. Ilustrasi grafik berikut menjelaskan hal tersebut :

Gambar 5.1
Pengaruh Zakat terhadap kurva Penawaran

Amirul Basir



Perubahan kemiringan (slope)

Penawaran agregatif dalam jangka panjang sebagai akibat pengenaan zakat

3. Khums

Dalam sistem ekonomi islam, yang dikenal adalah sistem proportional tax, seperti ditegaskan oleh Alquran (QS 8:41) tentang khums. Perbedaan pendapat timbul diantara ulama Suni dan Syai'ah dalam menerjemahkan kalimat : "ghanintum min syai'in"; artinya "...dari apa yang kamu peroleh..." yang diperdebatkan adalah semua jenis barang, sedangkan sebagian lain menganggap yang boleh diambil hanya barang tertentu.

Para ulama Syi'ah berpendapat, khums sebesar 20% dikenakan terhadap sumber pendapatan apa pun, namun ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berkenaan dengan harta rampasan perang. Menurut Imam Abu Ubaid, yang

dimaksud khums bukan hanya hasil perampasan perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

4. Jizya

Jizya berupa pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam. Jizya sama dengan poll tax karena kalangan nonmuslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh pemeluk Islam.

5. Khaffarah

Kaffarah berupa denda; misalnya yang dikenakan kepada suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan puasa. Denda tersebut dimasukkan dalam pendapatan negara.

Contoh lain adalah orang yang meninggal tanpa memiliki ahli waris sehingga warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara. Pada zaman Umar Bin Khattab RA diberlakukan zakat untuk melewati jembatan

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar.

Bank Sentral sebagai otoritas moneter mengendalikan penawaran akan uang, kredit bank, serta menentukan tingkat suku bunga, arus kredit, dan perkembangan sektor finansial pada sebuah perekonomian. Bank Sentral juga mampu mengendalikan jumlah maksimum suku bunga yang dapat dibayarkan terhadap jumlah simpanan tertentu kepada bank-bank dan menentukan proporsi saham yang dapat dibeli melalui

kredit. Dalam hal-hal tertentu, bank sentral memiliki kekuasaan mengendalikan kredit komersial, kredit perumahan dan kredit konstruksi lainnya.

Tindakan-tindakan bank sentral dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan tersebut mengalami evolusi panjang, begitu juga dengan bentuk kebijakan itu sendiri. Dalam mengimplementasikan kebijakannya, bank sentral menggunakan empat instrumen atau alat utama yaitu :

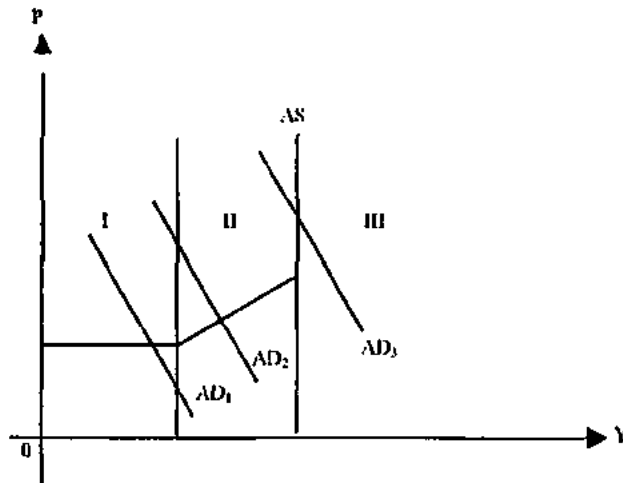
1. Tingkat diskonto (discount rate) atau fasilitas diskonto yang mempengaruhi biaya uang
 2. Operasi pasar terbuka (open market operation) yang mempengaruhi jumlah uang beredar
 3. Ketentuan cadangan minimum (reserve requirement) atau RR yang mempengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan (tidak boleh disalurkan sebagai kredit) oleh bank
 4. Imbauan moral (moral suasion) yang ditujukan untuk mengubah tanduk para bankir dan manajer senior institusi finansial dalam kegiatan operasional bisnisnya agar searah dengan kepentingan publik atau pemerintah.
- 5.4. **Dampak kebijaksanaan fiskal terhadap pertumbuhan**

Berbicara masalah kebijaksanaan fiskal maka fokus perhatian ditujukan pada anggaran belanja negara (budget)

Yang dimaksud dengan anggaran belanja negara (budget) adalah semua anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di seluruh tingkat pemerintah, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Anggaran belanja ini direncanakan setahun sebelumnya. Budget harus diajukan kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk diperiksa

apakah memerlukan perbaikan atau perubahan sebelum disetujui oleh DPR. Selain untuk mewujudkan stabilitas perekonomian, pembelanjaan pemerintah ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Secara grafik kebijakan fiskal dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.2



DAMPAK KEBIJAKSANAAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN

Keterangan :

I. Keynesian case

Pada kondisi ini, tingkat harga bersifat kaku (rigid) sehingga kurva AS bersifat elastis sempurna. Pertambahan output tidak akan mengakibatkan kenaikan harga maupun pendapatan nasional (Y). Kebijakan pemerintah meningkat AD sangat efektif karena adanya kenaikan pendapatan nasional (Y) sedangkan tingkat harga tidak mengalami perubahan.

II. Positive slope

Kondisi ketika terjadi pergeseran kurva AS yang menyebabkan kenaikan tingkat pendapatan nasional (\hat{Y}) sekaligus menyebabkan naiknya harga (P)

III. Classical case

Pada kondisi ini kurva AS bersifat inelastis sempurna berdasarkan asumsi full employment. Dalam hal ini tidak mungkin adanya pertambahan output tanpa investasi baru. Pada kondisi ini harga sangat mudah meningkat jika terjadi peningkatan AD.

5.5. Instrumen Moneter

Instrumen moneter yang digunakan dalam kebijaksanaan moneter Islam tampak ada beberapa variasi berdasarkan negara yang mempraktekkannya. Berikut ini dicontohkan beberapa negara yang mengaplikasikan instrumen moneter secara berbeda.

SUDAN

Instrumen moneter yang digunakan oleh Sudan dalam operasinya adalah sebagai berikut :

1. *Reserve requirement* : setiap bank harus mencadangkan simpanan di Bank Sentral Sudan sedikitnya 20% (10% untuk simpanan dalam mata uang asing) dari total dana simpanan masyarakat (dengan pengecualian simpanan investasi) yang direfleksikan pada neraca akhir bulan bank tersebut;
2. Bank-bank komersial harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal;
3. Plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti :
 - a. pertanian;
 - b. ekspor;



- c. perindustrian;
- d. pertambangan dan energi;
- e. transportasi dan perdagangan;
- f. profesional, pengrajin, dan bisnis keluarga ukuran kecil;
- g. perumahan rakyat;
- h. investasi pada pasar saham resmi Khartoum.

Dengan ketentuan minimum 90% dari dana kredit bank harus dialokasikan pada sektor prioritas tersebut dan sisanya dialokasikan pada sektor nonprioritas, termasuk perdagangan domestik dan jasa yang tidak berhubungan dengan sektor prioritas.

4. Marjin keuntungan minimum untuk perjanjian murabahah (berkisar antara 10% ~ 50%, bergantung pada sektor dan mata uang yang digunakan);
5. Penyertaan minimum nasabah untuk perjanjian musyarakah sebagai alat pengatur jumlah ketersediaan sumber daya untuk kredit (sampai dengan 1998);
6. Jendela pembiayaan sebagai fasilitas siaga yang dapat digunakan oleh bank-bank jika mereka memintanya, baik untuk keperluan likuiditas maupun pembiayaan investasi);
7. Aturan-aturan kualitatif dan kuantitatif seperti :
 - a. Ketentuan minimum 50% dari total kredit yang diberikan harus untuk daerah *rural*;
 - b. Kelompok bank-bank dapat membentuk portofolio kredit untuk sektor prioritas hanya jika mereka memberitahukan Bank Sentral Sudan sebelumnya;

- c. Kredit tidak akan diberikan kepada orang/institusi yang gagal memenuhi kewajibannya pada sistem perbankan kecuali jika disetujui sebelumnya oleh Bank Sentral Sudan;
 - d. Persentase tertentu akan diambil dari pendapatan bank yang gagal menyelesaikan pembayaran kredit kepada nasabahnya, dalam hal ini jumlah nominalnya akan ditambahkan pada *bad debt provision*;
 - e. Seluruh kredit harus dipastikan mematuhi ketentuan syariah;
8. *Foreign exchange operation* sebagai alat Bank untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang (bukan untuk fungsi kontrol likuiditas);
9. *Oper Market Operation*, dengan menggunakan instrumen :
- a. *Central Bank Musharaka Certificate*, dalam hal ini fungsi sekuritas bank sentral konvensional sebagai pengendali likuiditas uang terpenuhi melalui sekuritas berdasarkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam. Bank Central ini memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - i. tidak mempunyai tanggal jatuh tempo;
 - ii. berbasis ekuitas (*equity-based*) dalam jumlah tertentu dari investasi bank pemerintah di bank-bank komersial;
 - iii. memiliki nilai nominal *uniform* yang sebanding dengan nilai akunting total jumlah investasi dibagi jumlah sertifikat yang diterbitkan;
 - iv. dapat diperdagangkan oleh pemilik di pasar sekunder melalui prosedur administrasi standar, sedangkan pada pasar primer penjualan adalah melalui pelelangan;
 - b. *Government Musharaka Certificate* yaitu instrumen yang memungkinkan pemerintah melakukan pengumpulan dana melalui penerbitan sekuritas

yang menjamin suatu pengembalian kepada investor. Pengembalian ini dinegosiasikan sebelumnya atas dasar investasi mereka pada aset pemerintah yang berbentuk kepemilikan pada perusahaan-perusahaan publik atau patungan yang menguntungkan dalam operasinya.

Secara garis besar, kegunaan Sertifikat ini adalah :

- i. Membiayai anggaran;
- ii. Instrumen *Open Market Operation* bagi bank Sentral Sudan;
- iii. Memobilisasi tabungan nasional;
- iv. Mendorong investasi; dan
- v. Mengembangkan pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam.

10. *Ijara Certificate (Sukuk)* yaitu sekuritas untuk memobilisasi simpanan jangka pendek yang digunakan membangun proyek infrastruktur jangka panjang seperti lapangan terbang, jalan raya, bangunan, pabrik, sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik, dan penyulingan minyak.

Oleh karena pendapatan dari sekuritas jenis ini adalah pendapatan sewa, serta basis asetnya (*underlying asset*) berwujud dan tersekuritisasi, maka *sukuk* dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Sukuk adalah instrumen finansial yang mempresentasikan tiga perjanjian dasar, yaitu :

- i. Perjanjian pembelian aset;
- ii. Perjanjian sewa-menyewa;
- iii. Perjanjian penjualan aset.

IRAN

Iran adalah satu-satunya negara yang menerapkan sistem perekonomian dengan mengacu pada pemikiran teori ekonomi Islam mazhab pertama. Pada dasarnya, instrumen moneter yang ada harus jauh dari riba dan hal-hal yang mengandung ketidakpastian. Banyak modifikasi yang dilakukan oleh otoritas moneter di Iran terhadap sistem perbankannya agar tetap bisa kompetitif di era persaingan global.

Instrumen moneter yang dipakai oleh otoritas moneter di Iran adalah sebagai berikut :

1. *Reserve requirement ratio* : Ketentuan rasio cadangan ini adalah antara 10% sampai 30%, biasanya digunakan untuk menyerap kelebihan dana bank yang dianggurkan guna meningkatkan kualitas;
2. *Adjusted open market operation* : Pada dasarnya, OMO tidak efektif digunakan pada negara yang pasar keuangannya belum berkembang, sehingga diperlukan berbagai penyesuaian agar dapat efektif. Karena adanya keharusan menghindari pemakaian instrumen berdasarkan suku bunga yang telah ditentukan (*pre-determined interest based operation*), bank-bank tidak diperbolehkan membeli obligasi pemerintah, kecuali dengan menggunakan sumber daya sendiri;
3. *Discount rates* : Pelarangan terhadap riba membuat instrumen jenis ini tidak digunakan seluas seperti pada sistem perbankan konvensional. Namun, karena bank sentral adalah *leader of the last resort* dan *ultimate source of liquidity*, mereka harus dapat menyediakan likuiditas pada saat bank-bank membutuhkannya. Oleh karena mazhab pertama menganggap bahwa

discounting sekuritas yang didasarkan pada transaksi riil diperbolehkan, maka instrumen ini diperbolehkan;

4. *Credit Calling* : Instrumen ini digunakan untuk mengendalikan pencetakan uang dan merangsang pertumbuhan likuiditas, juga digunakan untuk mengalokasikan dana dan fasilitas kredit bagi sektor-sektor tertentu dalam perekonomian;
5. *Minimum expected profit ratio of bank dan bank share of profit in various contracts* : Dalam hal ini, bank sentral menetapkan rasio *minimum expected profit* bank dalam kerjasama ventura dan aktifitas mudharabah yang berbeda-beda untuk setiap sektor atau lapangan usaha.

INDONESIA

Peraturan perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1998, yang menggantikan peraturan perbankan syariah tahun 1992, memungkinkan perkembangan perbankan syariah dengan cepat. Terjadi peningkatan jumlah cabang bank syariah, baik dari bank umum yang berdasarkan syariah maupun divisi syariah bank umum konvensional. Meningkatnya kemampuan menyerap dana masyarakat terlihat dari dana simpanan yang tercantum di neraca bank-bank syariah tersebut. Hal tersebut mengharuskan Bank Indonesia, sebagai bank sentral, lebih menaruh perhatian dan lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank-bank umum, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan bank-bank syariah tersebut.

Terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah Islam, BI menjalankan fungsinya sebagai bank sentral dengan instrumen-instrumen sebagai berikut :

1. Giro Wajib Minimum : Biasa dinamakan juga *statutory reserve requirement*, adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang.

Besarnya GWM adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (rupiah) dan 3 % dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa laporan untuk dua masa laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud adalah dalam bentuk berikut :

- a. Giro wadiah;
- b. Tabungan mudharabah;
- c. Deposito investasi mudharabah; dan
- d. Kewajiban lainnya.

Dana pihak ketiga dalam IDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BPR. Sedangkan dana pihak ketiga dalam mata uang asing meliputi kewajiban dalam mata uang asing kepada pihak ketiga, termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri atas :

- a. Giro wadiah;
- b. Deposito investasi mudharabah; dan
- c. Kewajiban lainnya.

Bank Indonesia mengenakan denda terhadap kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk menentukan GWM. Bank yang melakukan pelanggaran GWM juga terkena sanksi.

2. *Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat IMA)* : yaitu instrumen yang diterbitkan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana.

Sertifikat berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankan kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik).

3. *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)* : yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam OMO. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

Dalam operasionalnya, SWBI mempunyai nilai nominal minimum Rp 500 juta dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari (misalnya : 7 hari, 14 hari, 30 hari). Pembayaran dan pelunasan SWBI dilakukan melalui debit/kredit

rekening giro bank di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter Sertifikat IMA.

5.6. Aplikasi Instrumen Moneter Konvensional di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki beberapa instrumen moneter, antara lain sebagai berikut :

1. OMO melalui jual-beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di pasar uang (saat ini tingkat suku bunga SBI sebesar 17,58%);
2. RR yang ditentukan oleh Bank Indonesia (sebesar 5% pada saat ini);
3. Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) yang ditentukan oleh Bank Indonesia (sebesar 8% pada saat ini);
4. Plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti sektor usaha kecil dan menengah di daerah pedesaan;
5. Sistem pengawasan perbankan dengan memakai sistem *forward looking risk-based supervision* yang mengacu pada standar internasional;
6. *Fit and proper test* yang ditujukan kepada orang-orang yang akan menduduki posisi penting di bank-bank umum;
7. BPMK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang ditujukan untuk membatasi pemberian kredit oleh bank-bank kepada kelompok usaha sendiri.

5.7. Nilai Tukar Ukar

Exchange rates (nilai tukar uang) atau lebih populer dengan sebutan kurs mata uang adalah harga pasar mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata

uang domestik (*domestic currency*), atau sebaliknya harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar mata uang merepresentasikan tingkat harga pertukaran suatu mata uang ke mata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, misalnya transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, atau aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis atau batas-batas hukum.

Nilai tukar suatu mata uang dapat ditentukan oleh pemerintah (otoritas moneter) seperti di negara-negara yang memakai sistem *fixed exchange rates* atau ditentukan oleh kombinasi kekuatan pasar yang saling berinteraksi (misalnya : bank komersial, perusahaan multinasional, perusahaan manajemen asset, perusahaan asuransi, bank devisa, dan bank sentral) serta kebijakan pemerintah seperti di negara-negara yang menggunakan sistem *fixed exchange rates*.

Jadi sistem ini tidak semata-mata mengambang yang hanya dipengaruhi oleh kekuatan pasar.

Penyebab fluktuasi nilai tukar mata uang dalam Islam ada 2 :

1. Alamiah (Natural)
2. Faktor kesalahan manusia (Human error)

Penyebab ini bisa terjadi pada 2 keadaan :

1. Perubahan harga terjadi di dalam negeri

Dalam hal ini faktor-faktor penyebab dari luar negeri dianggap tidak berpengaruh.

a. Alamiah

a.1. Perubahan permintaan agregatif. Peningkatan permintaan agregatif menyebabkan kenaikan harga dalam negeri, harga di luar negeri tetap maka nilai tukar akan mengalami depresiasi, demikian sebaliknya.

a.2. Perubahan penawaran Agregatif. Jika penawaran agregatif meningkat, harga cenderung turun maka nilai tukar rupiah menguat (apresiasi) demikian sebaliknya.

b. Kesalahan manusia

b.1. Korupsi dan administrasi buruk

Hal ini menyebabkan harga naik sebagai akibat *cost of production* yang naik maka mata uang akan terdepresiasi.

b.2. Pajak penjualan yang sangat tinggi juga dapat mendepresiasi mata uang.

b.3. Pencetakan uang yang berlebihan akan menyebabkan inflasi (harga naik), maka nilai tukar akan terdepresiasi.

2. Perubahan harga di luar negeri di mana faktor di dalam negeri dianggap tidak berpengaruh.

Misalkan penawaran mata uang dolar menurun ($S \downarrow$) maka mata uang domestik terdepresiasi, dan harga dalam negeri menjadi naik karena harga barang input yang diimpor menjadi mahal.

Hal lain yang dapat menyebabkan nilai rupiah terdepresiasi jika negara lain melepas Rupiah di pasaran. Hal ini menyebabkan suplai Rupiah naik dan harga mata uang Rupiah menjadi turun (terdepresiasi).

Sedangkan kebijakan Nilai tukar Konvensional pada umumnya sebagai berikut :

1. *Fixed exchnage rates*

Nilai tukar yang dipagu, memungkinkan menetapkan nilai tukar yang berbeda untuk keperluan tertentu. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesempatan arbitrase kepada orang-orang yang membeli mata uang asing (US\$) dengan harga murah dan menjual dengan harga tinggi. Karena begitu besarnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan maka muncullah pasar uang gelap (*black market in currencies*) yang semakin mengacaukan pagu yang ditetapkan pemerintah.

2. *Flexible exchange rate*

Teori Neoklasikal berpendapat tingkat harga suatu negara dapat berubah karena berubahnya penawaran uang. Kenaikan penawaran rupiah bisa mendepresiasi rupiah dan sebaliknya. Seringkali Bank Sentral harus mengintervensi nilai tukar. Tindakan ini kadangkala berasal dari berbagai tekanan yang datang dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Misalnya antara kepentingan orang untuk membayar hutang dan orang yang bergerak dibidang bisnis ekspor.

II. Perbedaan Ekonomi Islam dan Konvensional Dalam Perspektif Mikro

5.8. Teori Konsumsi

a. Konvensional

Pada teori ini Pendapatan merupakan penjumlahan Konsumsi dan Tabungan

$$Y = C + S$$

Y adalah Pendapatan

C adalah Konsumsi

S adalah Tabungan

$$Y_1 = C_1 + S_1 \rightarrow \text{pendapatan periode pertama}$$

$$Y_2 = C_2 + S_2 \rightarrow \text{pendapatan periode kedua}$$

Jika konsumsi periode pertama lebih kecil dari pendapatan maka konsumsi di periode kedua semakin besar.

$$Y_1 = C_1 + S_1 \text{ dan } C_1 < Y_1$$

$$\text{Maka } Y_2 = C_2 + S_2 \text{ dimana } C_2 = C_1 + S_1$$

$$\text{Jadi } Y_2 = (C_1 + S_1) + S_2$$

Bila ada sistem bunga, maka saving pertama memberi nilai tambah sebesar bunga.

b. Islam

Pendapatan adalah Konsumsi ditambah Infak dan Tabungan

$$\text{Sehingga : } Y = (C + \text{Infak}) + S \rightarrow Y = FS + S$$

$$FS_t = C + \text{Infak}$$

$$S_t = C_t + I$$

$$\text{Maka } S_t = FS_t + I$$

- Asumsi :
1. Syariah dilaksanakan
 2. Zakat adalah wajib
 3. Tidak ada riba
 4. Mudharabah adalah wujud perekonomian
 5. Perilaku ekonomi masyarakat adalah maksimalisasi.

Perbedaan kedua konsep diatas adalah :

1. Ada tidaknya faktor bunga yang dilibatkan di setiap kegiatan ekonomi.
2. Ada tidaknya unsur infak yang dikeluarkan.
3. Ada tidaknya zakat yang wajib dikeluarkan.

5.9. Teori Produksi

Dalam hal ini perbedaan ekonomi Islam dan Konvensional tidak terlepas pada filosofi ekonominya, bukan pada ilmu ekonominya. Ekonomi Islam memiliki nafas / nilai-nilai yang dibatasi oleh syariah, sedangkan alat analisisnya hampir mirip dengan ekonomi konvensional.

Maka faktor produksi dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Faktor Produksi Tenaga Kerja.
2. Faktor Produksi Alam
3. Faktor Produksi Modal
4. Faktor Produksi Skill

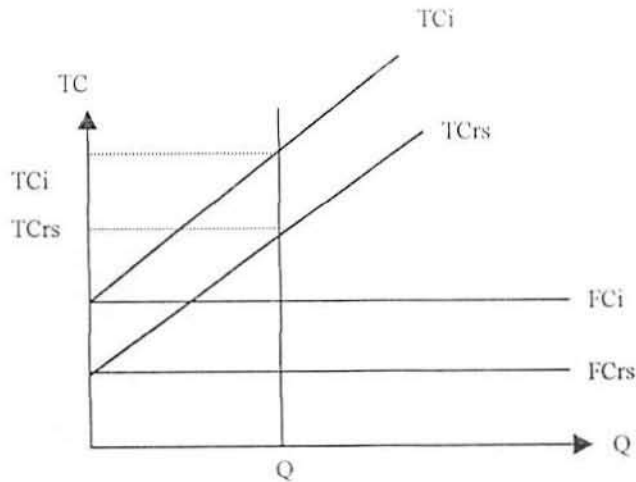
Suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien jika memenuhi salah satu hal dibawah ini :

1. Meminimalkan biaya untuk memproduksi jumlah yang sama.
2. Memaksimalkan produksi dengan jumlah biaya yang sama.

Dalam teori Produksi ini dapat dilihat efisiensi sistem produksi yang melibatkan bunga disatu sisi, di sisi lain menggunakan sistem bagi hasil.

- a. Meminimalkan biaya untuk memproduksi jumlah yang sama

Gambar 5.3
MEMINIMALISASI BIAYA UNTUK MEMPRODUKSI JUMLAH YANG SAMA



Keterangan :

TC_i = Total Cost dengan sistem bunga

TC_{rs} = Total Cost dengan sistem bagi hasil

FC_i = Fixed Cost dengan sistem bunga

FC_{rs} = Fixed Cost dengan sistem bagi hasil

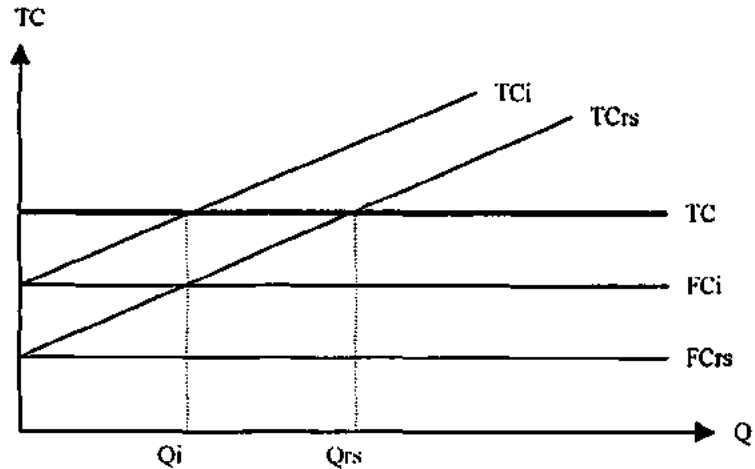
Q = Jumlah produksi

Kesimpulan : $TC_i > TC_{rs}$, jadi Total Cost dengan sistem bagi hasil lebih rendah, dengan kata lain lebih efisien untuk jumlah produksi yang sama.



b. Memaksimalkan Produksi dengan biaya yang sama

Gambar 5.4
MAKSIMALISASI PRODUK UNTUK BIAYA YANG SAMA



Keterangan :

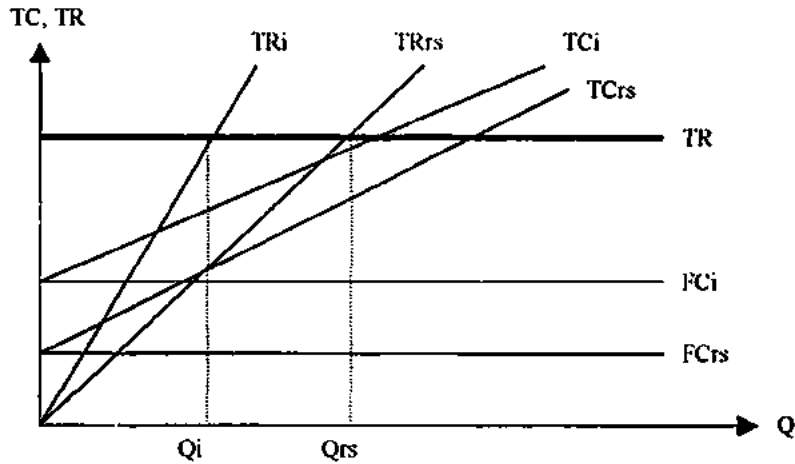
Q_i = Jumlah produksi dengan melibatkan sistem bunga

Q_{rs} = Jumlah produksi dengan melibatkan sistem bagi hasil.

Kesimpulan : Dengan besar TC (Total Cost) yang sama, jumlah produksi yang dihasilkan ternyata lebih besar yang menggunakan sistem bagi hasil ($Q_{rs} > Q_i$).

Jadi kesimpulan umum yang bisa diambil bahwa efisiensi lebih tinggi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini berpengaruh pada besarnya TR (Total Revenue). Untuk TR yang sama jumlah produksi (Q) pada sistem bagi hasil lebih besar dari sistem bunga. Jadi lebih efisien menggunakan sistem bagi hasil dan mendorong produsen memproduksi pada skala ekonomi yang lebih besar.

Gambar 5.5
SKALA EKONOMI ANTARA SISTEM INTERES DENGAN PROFIT/REVENUE SHARING



TR_i = Total Revenue dengan sistem bunga

TR_{rs} = Total Revenue dengan sistem bagi hasil

$Q_{rs} > Q_i$

Produksi dengan menggunakan sistem profit / revenue sharing lebih efisien dan juga memberikan Q yang lebih besar pada total revenue (TR) yang sama, $Q_{rs} > Q_i$ yang lebih besar dari BEP.

5.10. Teori Permintaan

Hukum permintaan menyatakan hubungan yang berkebalikan antara jumlah barang yang diminta dengan harga, artinya jika terjadi penurunan harga maka jumlah barang yang diminta akan naik dengan asumsi *Ceteris Paribus*. *Ceteris Paribus* adalah Kondisi dimana semua faktor yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap atau konstan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kurva permintaan adalah sebagai berikut :

1. Taste dan Preferensi

Hal ini berpengaruh searah (hubungan positif) artinya jika selera dan preferensi masyarakat meningkat dengan tingkat harga yang sama maka kurva permintaan bergeser kekanan atas.

2. Harga dari barang lain yang berkaitan

Jika barangnya adalah barang komplementer maka kenaikan harga barang tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kurva permintaan.

Jika barangnya adalah barang substitusi maka kenaikan harga barang tersebut menyebabkan kenaikan kurva permintaan.

3. Perkiraan harga relatif dimasa yang akan datang.

Jika perkiraan harga meningkat maka kurva permintaan akan bergeser kekanan atas.

4. Perubahan Pendapatan

Jika barang tersebut adalah barang normal maka dengan naiknya pendapatan akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke kanan atas.

Jika barang tersebut adalah barang inferior maka adanya kenaikan pendapatan akan menyebabkan turunnya jumlah yang diminta (kurva bergeser ke kiri bawah).

5. Perubahan Jumlah konsumen

Jika jumlah konsumen semakin banyak maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas.

Pada teori permintaan Islam memasukkan asumsi bahwa barang yang diminta adalah barang halal. Jika pilihan yang terjadi adalah antara barang halal dan haram maka

akan memberi implikasi pada kurva permintaan yang bentuknya menjadi tidak normal. Permintaan akan barang haram bukan fungsi dari harga juga fungsi yang kontinu, bukan pula berbentuk kurva, tetapi hanya demand point (titik permintaan) karena sifatnya darurat yang dibatasi oleh syariah.

5.1.1. Teori Penawaran

Penawaran adalah daftar yang menunjukkan jumlah suatu barang dimana produsen ingin dan dapat menjual pada berbagai tingkat harga untuk periode waktu tertentu, dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

Hukum penawaran memiliki hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan, artinya semakin tinggi harga banyak jumlah yang ditawarkan.

Faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi kurva Penawaran.

1. Perubahan Teknologi.

Adanya perbaikan teknologi akan menyebabkan proses produksi menjadi lebih efisien, sehingga pada harga yang sama dapat diproduksi jumlah yang lebih besar.

2. Perubahan dari harga sumber daya yang relevan

Adanya penurunan harga sumber daya akan menyebabkan ongkos produksi akan menurun sehingga kurva penawaran akan bergeser ke kanan.

3. Perubahan dari harga barang alternatif yang mempergunakan sumber daya yang sama.

Jika harga barang X naik maka penggunaan sumber daya untuk barang X naik, sehingga sumber daya yang dipergunakan untuk memproduksi barang Y menjadi

berkurang. Akibat selanjutnya produksi barang Y menjadi berkurang maka kurva penawaran bergeser ke kiri.

Pada prinsipnya teori penawaran adalah sama. Namun dalam penawaran ekonomi Islam memasukkan unsur Zakat yang tidak mempengaruhi Total Cost sehingga tidak mempengaruhi kurva penawaran, karena zakat merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh produsen (si empunya) dan tidak boleh dialihkan pada konsumen.

Demikian juga harus diterapkan konsep adil dalam ekonomi Islam yang diterjemahkan dalam empat hal :

1. Dilarang melakukan inafsadah
Yaitu transaksi barang haram
2. Dilarang melakukan transaksi gkarar
Yaitu hal-hal yang mengandung unsur keraguan
3. Dilarang melakukan transaksi mansir
Yaitu hal-hal yang mengandung unsur penipuan
4. Dilarang melakukan transaksi Riba
Yaitu melibatkan unsur bunga.

5.12. Negative Externality

Tindakan yang seringkali dilakukan oleh produsen dalam rangka memaksimalkan profit adalah mengalihkan biaya yang seharusnya ditanggung oleh produsen menjadi tanggungan masyarakat. Misalnya pembuangan limbah sembarangan, dimana akibatnya ditanggung oleh masyarakat dan bisa disebut Social Cost.

Tindakan ini jelas aniaya, karena produsen jelas-jelas mendapat keuntungan dari proses produksi, namun tidak mau menanggung biaya penanganan limbah, maka dalam Islam tindakan ini disebut perbuatan dzalim yang berkonsekuensi dosa.

5.13. Mekanisme Pasar

Beberapa pandangan tentang mekanisme pasar di kemukakan para pemikir ekonom islam antara lain : Algrhozaly, Abu Yusuf, Ibu Taimiyah, Ibu Khaldun. Ada beberapa variabel yang menyebabkan perubahan harga, disamping permintaan, penawaran barang, juga jumlah uang yang beredar, penimbunan dan penahanan barang. Pada prinsipnya para pemikir diatas tidak menoleh bahwa terdapat pengaruh penawaran dan permintaan barang dan jasa yang pada mekanisme pasar sehingga dapat menentukan besarnya harga keseimbangan. Mekanisme pasar yang normal dapat ditolerir dan diterima, kecuali jika ini tidak berjalan normal maka disarankan pemerintah melakukan kontrol harga.

Dalam konsep islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpadu untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut (the price of equivalent). Konsep ini mempunyai unplikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif. Bentuk pasar monopoly, duopoly dan oligopoly pada prinsipnya tidak dilarang perbedaannya, selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal. Hal ini merupakan konsekwensi dari the price of the equivalent.

Beberapa ketentuan yang dilarang adalah :

1. Mengurangi timbangan
2. Menyembunyikan barang cacat

3. Menukar dengan barang yang tidak sama sekaring merugikan.
4. Menukar dengan kualitas yang berbeda dan merugikan konsumen
5. Terlalu memuji barang sehingga orang tertarik lalu tertipu.
6. Dilarang mengambil keuntungan diatas keuntungan normal (terlalu berlebihan)
7. Dilarang menjual diatas harga pasar.
8. Menjual barang dengan tidak kompetitif (menimbun, menahan dan lain-lain)

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan price intervention bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply. Intervensi ini dilakukan dengan alasan :

1. Menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi produsen dalam hal perole profit margin dan juga kepentingan konsumen dalam hal daya beli
2. Dikhawatirkan ada kedzaliman pihak produsen pada konsumen
3. Melindungi konsumen (masyarakat luas) berarti melindungi kepentingan umum.

Pada point 2 lebih ditegaskan oleh Ibn Taimiyah yaitu misalnya jika produsen menjual harga yang lebih tinggi dari harga pasar, padahal masyarakat sangat membutuhkan. Jadi pada intinya investasi pemerintah bertujuan melindungi kedua belah pihak baik produsen maupun konsumen.

Jika dicermati sebenarnya kondisi ideal seringkali tidak berjalan sebagaimana mertinya karena beberapa hal :

1. Distorsi penawaran dan permintaan yang biasa dinamakan Ba'i Najasy dan ikhtikar. misalnya melakukan permintaan palsu dan penimbunan.

2. **Tadlis (penipuan) yang dikelompokkan dalam empat hal (kualitas, kuantitas, harga, pengiriman)**
3. **Taghrir (kerancuan) yaitu kegiatan bisnis yang bersifat spekulasi yang berlebihan sehingga bisa merugikan pihak lain (tindakan yang berisiko ketidakpastian yang meresahkan).**

BAB VI

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari kajian ini adalah beberapa perbedaan yang prinsip antara teori ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam dilihat dari bahasan makro ekonomi maupun mikro ekonomi.

Ekonomi Islam :

1. Secara umum didasarkan atas lima unsur nilai universal, yakni : Tauhid, Adil, Nubuwwah, Khilaffah dan Ma'ad. Kelima nilai ini menjadi dasar dan inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Disamping itu pelaku ekonomi dan bisnis harus memenuhi sifat : Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualia), Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

2. Ekonomi Mikro Islam

Dalam Teori Permintaan pada prinsipnya sama antara ekonomi Islam dan konvensional, hanya dalam ekonomi Islam jelas memberikan pilihan barang halal dan haram. Pada teori penawaran dan produksi memasukkan unsur zakat. Sedangkan dalam berproduksi menggunakan sistem bagi hasil bukan sistem bunga. Pada teori konsumsi memasukkan unsur Infak dan Zakat. Mekanisme pasar pada prinsipnya didukung selama tidak membuat kezaliman baik pihak produsen maupun konsumen. Demikian juga bentuk-bentuk pasar monopoli, duopoli maupun oligopoli tidak menjadi masalah selama diprakteknya

difungsikan bagi kemaslahatan masyarakat. Pemerintah pada khususnya berperan menghilangkan distorsi pasar yaitu : Ba'najasy, Ikhtikar, Tadiis dan Taghrir.

3. Ekonomi Makro Islam

Dalam kajian ini difokuskan pada teori uang, inflasi, teori nilai tukar dan kebijakan fiskal dan moneter.

Konsep Islam tentang uang adalah uang tidak identik dengan modal dan merupakan publik goods dan dianggap flow concept. Fungsi uang dalam Islam hanya dua yaitu medium of exchange dan unit of account. Sedangkan inflasi disebabkan dua hal yaitu natural inflation dan human error inflation. Kebijakan fiskal menitikberatkan pada masalah APBN, dalam Islam, jenis penerimaan berasal dari Isharaj, Zakat, Khums, Jizya dan penerimaan lain, sedangkan pengeluaran lebih difokuskan untuk agama dan kesejahteraan sosial. Pada kebijakan fiskal ini, budget defisit ditolerir tetapi lebih diutamakan budget surplus. Kebijakan moneter Islam melarang tindakan spekulasi penghapusan bunga, pajak atas kapasitas yang mengganggu. Instruemn kebijakan moneter Islam adalah Giro Wajib Minimum, Sertifikat Investasi Mudharabah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dimana variasinya tergantung negara yang bersangkutan. Sedangkan yang mempengaruhi nilai tukar ada dua hal : natural dan human error. Dua hal ini bisa terjadi pada kondisi dimana perubahan harga terjadi di dalam negeri atau terjadi di luar negeri.

Ekonomi Konvensional :

1. Secara umum teori ekonomi ini mengakui kepemilikan harta pribadi secara penuh (sosialis sebaliknya) dan penekanan pada efisiensi dalam alokasi sumber daya

guna memaksimalkan output yang aplikasinya dapat menimbulkan trade-off dengan equality (pemerataan). Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler (orientasi duniawi), karena itu menjadi bebas nilai (posiuvistik).

2. Ekonomi mikro konvensional

Dalam teori permintaan tidak membedakan pilihan barang haram – haram. Teori penawaran dan produksi selalu memasukkan unsur bunga sehingga berimplikasi pada efisiensi produksi. Pada teori konsumsi terdapat sistem bunga sehingga memperbesar nilai saving (tabungan). Mekanisme pasar pada teori ini sangat diagungkan, sehingga bentuk-bentuk pasar tidak sempurna cenderung dikecam (monopoli, duopoli, oligopoli). Dengan konsep ‘invisible hand’-nya, teori ini berusaha meniadakan campur tangan pemerintah karena dianggap bisa menimbulkan distorsi pasar.

3. Ekonomi makro konvensional

Konsep konvensional menganggap uang adalah private goods dan cenderung stock concept karena uang diidentikkan dengan modal. Dan fungsi uang ada tiga, dimana dua sama dengan konsep Islam, yang ketiga adalah store of value. Hal ini sebagai konsekuensi dari anggapan uang adalah modal. Inflasi disebabkan oleh natural, actual, demand pull dan cost push, spirall imported dan domestik. Kebijakan fiskal yang memfokuskan pada APBN memiliki tiga alternatif budget yaitu surplus, defisit dan balanced. Kebijakan moneter memungkinkan tindakan spekulasi. Hal ini sebagai konsekuensi dari motif permintaan uang dari Teori Keynes. Sedangkan instrumen kebijakan moneter adalah Operasi pasar Terbuka, Tingkat Diskonto, Cadangan Minimum dan Himbauan moral. Teori nilai tukar

uang dari Neoklasikal beranggapan bahwa harga dari mata uang tergantung dari permintaan dan penawaran serta kebijakan fiskal dan moneter suatu negara serta kondisi politik dan ekonomi suatu negara.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam , Ekonomi Islam , Karim, B.C.,2001.
- Al-Qur'an & Al- Hadist.
- Capra, Umer.M , The Future of Economics, Islamic Foundation, 2000, Leiceste.
- Kamal, Mustofa , Islam dan Ekonomi, LP FE – UI , 1997.
- Karim, M. Rusli, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, PT. Tiara Wacana, Yogya, 1992.
- Kelana, Said , Ekonomi Mikro, Raja Grafindo Persada, 1994, Jakarta.
- Koutsōyiannis, A ; Modern Micro Economics Theory, Millan, 1986.
- Lubis, Ibrahim , Ekonomi Islam , Kalam Mulia, 1994, Jakarta.
- Maddala, GS & Eilen Miller, Micro Economic, Mc Graw Hill, 1989.
- Nicholsan, Waite , Micro Economic Theory, The Dryden Press, 1986.
- Samuelsen, Paul A & William D Nordhams, Ekonomi, Erlangga, 1997.
- Schumacher, E.F , Small in Beautiful , Harper & Row, 1975, New York.



- 1 JUN 2004